



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : PLN KANTOR PUSAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : KHUSNUL MUBIEN
2. Jabatan : EXECUTIVE VICE PRESIDENT PENGENDALIAN KINERJA KORPORAT
3. NHK : 112842

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 6.610.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 397 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.660.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 318 m2/526 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 3.950.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 958.000.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
2. MOTOR, KTM MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI SUV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
4. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
5. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
6. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 139.500.000

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. 231.597.561

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.299.986.124

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 10.239.083.685



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 10.239.083.685

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.